



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Berkelanjutan di Kota Kupang

The Effectiveness of Waste Management Policy Implementation in Achieving a Sustainable Urban Environment in Kupang City

Christina Chindy Tatuin¹, Margaretha Ignatin Subani², Anzu Anjani Manimabi³, Aldi Imanuel Tualaka⁴, Dewantry Putra Nakmofa⁵, Joseph Israel Nenot'ek⁶, Melki Tamonob⁷, Yanuarius Taloim⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT

*Corresponding Author: E-mail: tatuinsindy@gmail.com¹, subaninona06@gmail.com², anzumanimabi82@gmail.com³, aldytualaka222@gmail.com⁴, nakmofaputra18@gmail.com⁵, jojocavario@gmail.com⁶, mellotamonob@gmail.com⁷, yanuariustaloim@gmail.com⁸

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kota Berkelanjutan, Pelayanan Publik

Keywords:

Effectiveness, Policy Implementation, Waste Management, Sustainable City, Public Service

DOI: [10.56338/jks.v9i5.10934](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.10934)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan di Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah cukup efektif dilihat dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan. Keterbatasan sarana prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Meskipun demikian, kebijakan ini berkontribusi dalam mengurangi timbunan sampah, meningkatkan kebersihan lingkungan, dan mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Diperlukan penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi infrastruktur, dan monitoring berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of waste management policy implementation in realizing a sustainable urban environment in Kupang City. The research uses a qualitative approach with a case study method at the Dinas Hidup Kota Kupang. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that policy implementation is moderately effective in terms of target accuracy, program socialization, and goal achievement. Limitations in facilities, infrastructure, and community participation remain key constraints. Nevertheless, the policy contributes to

reducing waste accumulation, improving environmental cleanliness, and supporting sustainable urban development. Strengthening community involvement, optimizing infrastructure, and continuous monitoring are required to enhance policy effectiveness.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu global yang hingga saat ini belum terselesaikan secara optimal. Secara global, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun (Kaza et al., 2018). Di berbagai negara, pengelolaan sampah menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan (Hoorweg & Bhada-Tata, 2012). Banyak negara maju telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat, seperti daur ulang dan pengurangan sampah dari sumbernya (UN-Habitat, 2016). Namun, di negara berkembang, termasuk Indonesia, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya implementasi kebijakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat (Kaza et al., 2018).

Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi persoalan sampah yang cukup kompleks. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan signifikan jumlah sampah, terutama di wilayah perkotaan (KLHK, 2021). Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai kebijakan turunannya (KLHK, 2020). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah masih belum optimal (Nugroho, 2014). Menurut teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Jika keempat faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara regional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menghadapi permasalahan serupa, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Kupang. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat, yang berdampak pada peningkatan volume sampah (KLHK, 2021). Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti penumpukan sampah di ruang publik, pencemaran, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat (UN-Habitat, 2016). Dalam perspektif efektivitas organisasi, Richard M. Steers menyatakan bahwa efektivitas suatu program dipengaruhi oleh pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi terhadap lingkungan (Steers, 1985). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lokal.

Di tingkat lokal, Kota Kupang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Salah satu indikasinya adalah kondisi TPA Alak yang masih menggunakan sistem open dumping, yang sebenarnya telah dilarang karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (KLHK, 2020). Selain itu, kejadian kebakaran berulang di TPA Alak menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun koordinasi antar pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (Mazmanian & Sabatier, 1983) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya, serta kondisi lingkungan sosial dan politik.

Selain itu, pemerintah Kota Kupang telah berupaya melakukan berbagai inovasi kebijakan, seperti mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan sistem pemilahan sampah sejak dari sumbernya (KLHK, 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Nugroho, 2014).

Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait (Hardiyansyah, 2011). Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penanganan sampah di Kota Kupang (Edward III, 1980). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan, sehingga penting untuk dilakukan penelitian guna menganalisis secara lebih mendalam pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanganan sampah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan analisis dilakukan secara induktif (Sugiyono, 2020). Metode studi kasus digunakan agar peneliti dapat mengkaji fenomena secara komprehensif dan kontekstual (Creswell, 2014).

Lokasi penelitian berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Kota Kupang. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama efektivitas, yaitu ketepatan sasaran kebijakan, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan kebijakan, dengan mempertimbangkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah. Informan terdiri dari aparat Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, serta masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi lapangan untuk melihat kondisi nyata pengelolaan sampah, (2) wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari informan, dan (3) dokumentasi berupa arsip, foto, dan laporan kegiatan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Kebijakan

Ketepatan sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama pada wilayah pusat kota yang memiliki akses layanan pengangkutan sampah secara rutin. Penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada titik-titik

strategis serta jadwal pengangkutan harian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang membantu mengurangi timbunan sampah di kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas ekonomi.

Namun demikian, ketepatan sasaran ini belum sepenuhnya merata. Wilayah pinggiran kota dan beberapa kawasan permukiman baru masih mengalami keterlambatan layanan akibat keterbatasan armada pengangkut dan minimnya TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam perspektif efektivitas (Subagyo, 2001), ketepatan sasaran belum optimal karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terlayani secara proporsional.

Sosialisasi Program

Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti kegiatan di tingkat kelurahan, sekolah, serta pemanfaatan media sosial. Petugas kebersihan dan aparat kelurahan turut berperan dalam menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkelanjutan, pemahaman masyarakat mengenai konsep 3R (reduce, reuse, recycle) masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu wadah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menyentuh perubahan perilaku masyarakat secara mendalam. Dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980), aspek komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal sehingga pesan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Pencapaian Tujuan Kebijakan

Tujuan utama kebijakan pengelolaan sampah adalah mengurangi timbunan sampah, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta mendukung terwujudnya kota yang berkelanjutan. Dari hasil observasi, terlihat bahwa beberapa titik yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah kini relatif lebih bersih karena adanya pengangkutan rutin dan pengawasan petugas.

Namun demikian, kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Alak yang masih menggunakan sistem open dumping menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan belum sepenuhnya tercapai. Sistem ini berpotensi menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencapaian tujuan kebijakan dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala pada tahap pemrosesan akhir sampah.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam efektivitas kebijakan. Sebagian masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama di wilayah yang aktif mengikuti kegiatan kebersihan tingkat RT/RW. Namun, secara umum partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya masih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek aktif dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan pandangan Hardiyansyah (2011), pelayanan publik yang efektif harus melibatkan masyarakat secara aktif. Rendahnya partisipasi ini menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi

Keterbatasan jumlah armada, petugas kebersihan, serta sarana prasarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan sampah belum berjalan optimal, terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan kebersihan.

Dalam perspektif teori Edward III (1980), keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi yang belum optimal memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang dapat dikategorikan cukup efektif berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan. Kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan di beberapa wilayah kota. Namun, efektivitas tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pemrosesan akhir sampah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi di lapangan, terutama komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi masyarakat, serta perbaikan sistem pengelolaan di TPA agar tujuan mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah menunjukkan capaian yang cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Ketepatan sasaran layanan pengangkutan sampah telah terlihat di wilayah pusat kota, tetapi belum merata hingga ke wilayah pinggiran akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Dari aspek sosialisasi program, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat, namun pemahaman serta perubahan perilaku masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumbernya masih tergolong rendah sehingga penerapan prinsip 3R belum berjalan secara optimal.

Pencapaian tujuan kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang bersih telah terlihat di beberapa titik kota. Akan tetapi, kondisi TPA Alak yang masih menggunakan metode open dumping menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berwawasan lingkungan belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, terutama penambahan armada pengangkut dan penyediaan TPS pada wilayah yang belum terlayani secara optimal. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih partisipatif agar mendorong perubahan perilaku dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Perbaikan sistem pengelolaan di TPA Alak dari metode open dumping menuju sistem yang lebih ramah lingkungan sesuai standar nasional menjadi langkah yang mendesak. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan pengawasan, serta penegakan aturan kebersihan perlu dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui program berbasis komunitas seperti bank sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan secara rutin guna mendukung terwujudnya kota yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. CQ Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Gava Media.

-
- Hoorweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*. World Bank.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional. KLHK RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Laporan Pengelolaan Sampah Indonesia. KLHK RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Goodyear Publishing.
- Subagyo, J. (2001). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Rineka Cipta.
- UN-Habitat. (2016). *World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures*. United Nations Human Settlements Programme.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.